BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : Suara Pembaruan
Subyek : Perubahan Iklim
Edisi : 17 Januari 2008
Halaman : 6

Hasil Konferensi Perubahan Iklim Tak Untungkan Indonesia

[JAKARTA] Hasil konferensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Perubahan Iklim yang digelar di Bali, Desember 2007, dianggap tidak menguntungkan dan merupakan kekeliruan besar pemerintah Indonesia. Hasil konferensi sangat merugikan pertanian Indonesia.

Hal itu diungkapkan Koordinator Umum Gerakan Petani Internasional *La Via Campesina* Henry Saragih, dan Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Chalid Muhammad, serta pengamat ekonomi Ichsanuddin Noorsy, di Jakarta, Rabu (16/1). Ketiganya menilai, paradigma perdagangan karbon, justru akan menguntungkan negara-negara industri besar.

Henry mengatakan, dalam program sistem perdagangan karbon untuk koservasi hutan (REDD) Indonesia merencanakan mengonservasi 22 juta hektare hutan yang bernilai Rp 2 miliar per tahun. "Jadi kita disuruh menghutankan lagi, sementara negara-negara industri terus-menerus mengeluarkan karbon, dan ini hanya dibayar dua miliar per tahun. Itu kecil dibandingkan hasil tambang kita dan kekayaan alam yang begitu besar," kata peraih anugerah "50 Orang Penyelamat Bumi" versi harian *Guardian*, Inggris, itu.

Dia mengatakan, seharusnya lahan tersebut dapat digunakan untuk tanaman pangan Indonesia, bukannya malah menjual hutan untuk melanggengkan kekuatan ekonomi negara-negara yang tergabung dalam G8, terutama Jepang, Eropa, dan Amerika Serikat.

"Padahal orang butuh makan, kita perlu meningkatkan produksi tanaman pangan. Sebaliknya, hasil Bali itu kita malah disuruh untuk melestarikan hutan sebagai upaya untuk memapankan kelangsungan industri di negara-negara yang sudah kaya. Itu sebuah kekeliruan besar," ujarnya.

Karenanya, Serikat Buruh Tani akan meminta pemerintah memberikan objek-objek *land reform* tanah untuk pertanian, sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria.

"Lahan ini kita tanami tanaman-tanaman pangan untuk kebutuhan makanan kita dan untuk melestarikan alam kita," ucapnya.

Ia juga mengatakan, program untuk transfer dan pengembangan teknologi yang ramah lingkungan (*Clean Development Mechanism*), penggunaan bahan bakar yang rendah emisi (GRK) untuk industri dan transportasi. Indonesia menargetkan pengurangan bahan bakar fosil hingga 80 persen pada 2025. "Ini kan sama dengan artinya, tanamilah pertanian-pertanian kita dengan biodiesel bukan untuk tanaman makanan. Ini kontradiksi, sehingga wajar tempe tidak ada dan beras kurang," katanya.

Selanjutnya, Henry mempertanyakan, penetapan dana adaptasi di bawah pengelolaan global environment facility Bank Dunia.

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup

"Ini sama dengan dia kasih duit ke kita untuk pengembangan teknologi, lalu kita bayar lagi ke mereka. Ini kaya renternir. Rumah kita bocor tapi mereka suruh kita betulin rumah tapi beli sengnya dari mereka. Seharusnya kita bisa mendanai sendiri kalau utang yang dulu dihapuskan," kata Henry.

Menurutnya, Indonesia tidak boleh terikat dan bergantung pada industri negara G8 dan mengubah sistem ekonomi Indonesia dengan membangun industri berbasis kebutuhan rakyat Indonesia.

"Hasil industri tambang kita jangan dijual ke negara asing dan jangan dieksploitasi oleh perusahaan asing. Sebanyak 80 persen pertambangan kita dikuasai negara asing," katanya. [DLS/S-26]

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup